

**PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA
LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH
MAKMUR BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Erika Safitri

NPM 1551030034



Program Study Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442 H / 2021 M

**PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN
KEUANGAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BMT
SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)**

Oleh

**Erika Safitri
NPM 1551030034**

Program Study Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.

Pembimbing II: Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah, dimana transaksi-transaksi dasar pada penyusunan laporan keuangan syariah memuat tentang kegiatan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena itu dalam penentuan nisbah bagi hasil perlu dilakukan dengan baik agar dapat menguntungkan kedua pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung? Dan Apakah penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah?. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dan Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan, pada kantor BMT Syariah Makmur di Bandar Lampung.

Hasil penelitian pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung hanya menyajikan laporan Neraca, Laba/ Rugi dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Berdasarkan kesesuaian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan PSA No.101, penyajian Neraca atau Laporan Posisi Keuangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung sudah membuat atau sudah ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan tetapi secara keseluruhan pos-pos seperti Aset, Kewajiban, dan Ekuitas didalam laporan Neraca belum sesuai dengan pos-pos atau akun yang ada didalam PSAK NO. 101. Pada penyajian laporan Laba Rugi nama akun dan pos-pos yang ada hanyalah Pendapatan Operasional dan Biaya Operasional saja, dan tidak ada laporan keuangan Penghasilan Komprehensif lain sesuai dengan yang ada didalam PSAK NO. 101. BMT Syariah Makmur Bandar Lampung membuat catatan atas laporan keuangan dalam bentuk pos-pos laporan keuangan, namun dalam penyajiannya pos-pos laporan keuangan tidak terdapat informasi mengenai penggunaan dana zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan.

Kata Kunci: PSAK No. 101, Laporan Neraca, Laba/ Rugi Dan Catatan Atas Laporan Keuangan,

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erika Safitri
NPM : 1551030034
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG**” adalah benar-benar merupakan penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut pada *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 juni 2021
Penulis,

Eika Safitri
NPM 1551030034



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Psak 101 Tentang Penyajian
Laporan Keuangan Syariah Pada Laporan
Keuangan BMT Syariah Makmur Bandar
Lampung
Nama : Erika Safitri
NPM : 1551030034
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan
Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.
NIP.198308152006042004


Agus Kurniawan, S.E., M.S., Ak.
NIDN.0226127601

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir, M.S.I.

NIP. 197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Laporan Keuangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”. disusun oleh, Erika Safitri, NPM: 1551030034, Program Studi : Ekonomi Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munasqsyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu, 25 Agustus 2021

Tim Penguji

Ketua : Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy



sekretaris : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I



penguji I : Dr. Budimansyah, M.Kom.I



penguji II : Any Eliza, M.Ak



penguji III : Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.
NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya :

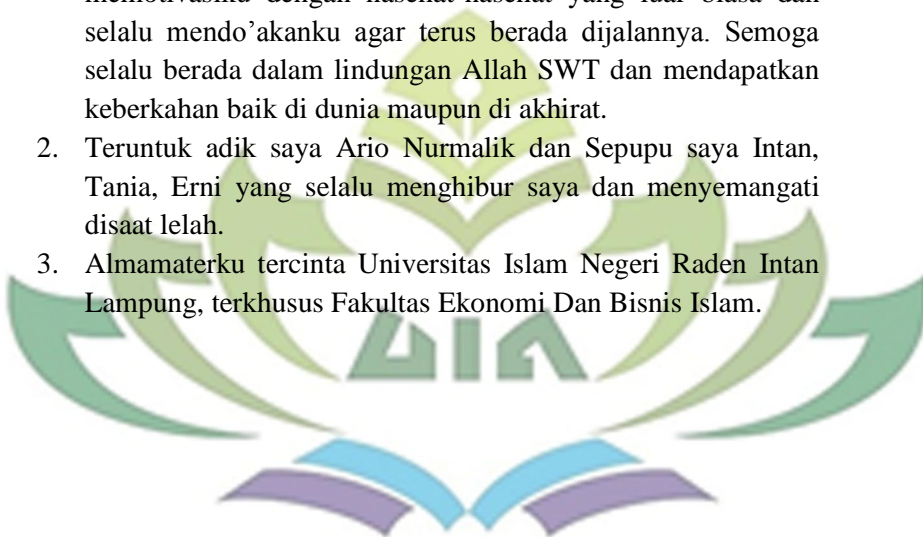
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah- Nya. Skripsi ini saya persembahkan dan penulis dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:


1. Kedua orang tua yaitu, Bapak Erwansyah dan Ibu Sri Endarwati yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa dan selalu mendo'akanku agar terus berada dijalannya. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Teruntuk adik saya Ario Nurmalik dan Sepupu saya Intan, Tania, Erni yang selalu menghibur saya dan menyemangati disaat lelah.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, terkhusus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



RIWAYAT HIDUP

Erika Safitri, dilahirkan di Bandar Lampung 1 Agustus 1997, Anak Pertama dari pasangan Bapak Erwansyah dan Ibu Sri Endarwati.

Pendidikan dimulai dari TK Diniyyah Putri Lampung selesai pada Tahun 2002 , lalu besekolah di SDN 2 Negeri Sakti selesai pada tahun 2003-2009. Bersekolah di SMPN 1 Gedong Tataan dan selesai pada tahun 2009-2012. selesai SMAN 7 Bandar Lampung pada tahun 2012-2015 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di mulai pada semester 1 TA. 2015/2016.



Bandar Lampung, 07 Juni 2021

Yang membuat,

Erika Safitri
NPM 1551030034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **“PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG”** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Akutansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan A. Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap dalam keseluitan- kesuliatan mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, M.S.I. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt dan Bapak Agus Kurniawan, S.E.,M.S.Ak masing masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan saran, bimbingan dan arahan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhususnya angkatan 2015 kelas C, teman seperjuangan Ahmad Sholihin Anwas, Lius Diana Putri yang telah memberi semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini yang selalu mendorong saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan akan saya terima. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 07 Juni 2021

Erika Safitri
NPM 1551030034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akutansi	17
1. Pengertian Akutansi	17
2. Tujuan Akutansi	17
3. Fungsi Akutansi	20
4. Jenis-jenis Akutansi	20
5. Pengertian Akutansi Syariah	23
6. Laporan Keuangan Syariah.....	25
7. Tujuan laporan keuangan syariah.....	26
8. Asas Transaksi Syariah	26
9. Karakteristik Transaksi Syariah	27

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tahun 2016 Tentang Penyajian laporan Keuangan Syariah	27
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah	27
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Tahun 2016	28
C. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK NO. 101	32
D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	40
E. Kerangka berfikir	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Profil Bmt Syariah Bandar Lampung	43
B. Visi misi dan Motto BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	44
C. Alamat BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.....	44
D. Produk-produk yang terdapat di dalam BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	45
E. Pengembangan SDM BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	46
F. Bidang Keanggotaan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	46
G. Pembinaan anggota BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.....	47
H. Bidang Keuangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.....	47
I. Perkembangan Asset BMT Syariah Makmur Bandar Lampung	48
J. Perolehan SHU BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.....	49
K. Struktur Organisasi BMT Syariah Bandar Lampung	49

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pelaporan Laporan Keuangan BMT Syariah Makmur	51
B. Kesesuaian Laporan Keuangan Bmt Syariah Makmur Dengan PSAK No. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari judul ini. Hal ini disebabkan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca, maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa kata yang dimuat didalam judul penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini berjudul **“PENERAPAN PSAK 101 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG”**. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pembahasan judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan beberapa istilah penting dari judul ini.

1. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. PSAK 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah.² PSAK 101 mengatur tentang

¹Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta,2002, h.1598.

² IAI, 2009 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Cet. Ke-II. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi Perbankansyariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan sarana yang di gunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya kepada pihak internal dan eksternal. Laporan ini menginformasikan semua transaksi bisnis (keadaan ekonomi perusahaan) dalam bentuk unit moneter. Pengambilan keputusan bisnis dapat di lakukan oleh pihak investor atau pihak lainnya yang membutuhkan dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan.³

4. BMT

Baitul Maal wa Tamwill merupakan sebuah lembaga keuangan mikro berbasis syariah, yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul maal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain, lembaga ekonomi berorientasikan sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk (terutama) zakat, dan menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa dalam arti seluas-luasnya.⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan dalam judul ini ialah tentang Penerapan PSAK NO. 101 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2016) Pada Laporan Keuangan BMT Syariah Makmur adalah untuk menerapkan PSAK NO. 101 tentang laporan keuangan yang merupakan sarana yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya dan laporan keuangan

³Hariyati, Susi Handayani dan Rohmawati Kesumaningtias : Buku 1, Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah, h. 4.

⁴ Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis vol. 2, No. 1, Maret 2015h. 82.

menginformasikan semua transaksi bisnis (keadaan suatu ekonomi perusahaan) pada lembaga keuangan mikro berbasis syariah, yang mengola keuangan masyarkat sesuai prinsip-prinsip syariah dalam sitem pengelolaan keuangannya.

B. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas–aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan.

Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan, ciri sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi penggerak roda bisnis lembaga tersebut. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).⁵

Keberadaan lembaga syariah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, dikandung maksud agar dapat meningkatkan taraf hidup melalui produk perbankan yang disediakan. Sebagaimana lazimnya suatu bank, lembaga keuangan syariah juga siap menerima penitipan uang dan pembiayaan kapada semua sektor usaha yang membutuhkan dana. Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh lembaga Islam yang mengembangkan konsep tanpa bunga,

⁵ *Ibid.*, h. 29

berikutnya menghasilkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh lembaga syariah.

Disisi yang lain, ketika lembaga keuangan syariah telah beroperasi untuk pencatatan transaksi keuangannya diperlukan Standar akuntansi yang berdasarkan dengan prinsip – prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip standar akuntansi syariah merupakan kunci sukses bagi bank/lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut akan terlihat dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan.

Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP).⁶ Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Baitul maal wa tamwil merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Baitul maal wa Tamwil sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama pada pengembangan masyarakat yang sering tidak terjangkau oleh lembaga keuangan lain.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan bagian dalam menjangkau pembiayaan usaha menengah, kecil dan mikro yang merupakan segmentasi sebesar dalam tata perekonomian masyarakat Indonesia.⁷ Kegiatan BMT diantaranya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil kebawah dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi.⁸

Mulai diterimanya bisnis syariah dan lembaga keuangan syariah yang lainnya termasuk didalamnya baitul mal di

⁶Muhammad Ridwan, h. 31

⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 242.

⁸ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2012) h. 364.

masyarakat, sudah pasti lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai alat untuk melaporkan kondisi keuangan dan kinerja lembaganya terkait masalah ini. Dalam hal ini yang memegang peran dalam hal informasi tentunya laporan keuangan lembaga tersebut. Laporan keuangan yang berisi berbagai informasi tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh para pemakainya, terutama bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat suatu keputusan.

PSAK 101 mengatur penyusunan laporan keuangan bagi lembaga keuangan syariah, dimana transaksi-transaksi dasar pada penyusunan laporan keuangan syariah memuat tentang kegiatan transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa menyewa. Oleh karena itu dalam penentuan nisbah bagi hasil perlu dilakukan dengan baik agar dapat menguntungkan kedua pihak.

Pentingnya penerapan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah pada BMT adalah agar lembaga tersebut dapat melakukan penyusunan laporan keuangan yang bermanfaat dan memudahkan dalam pemberian informasi keuangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan. BMT Syariah Makmur dapat memiliki catatan informasi keuangan pada suatu periode yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga, sehingga manajemen dapat mengetahui aset, kewajiban, modal, kontribusi biaya yang dikeluarkan sesuai tujuan lembaga dan pengambilan keputusan.

Kualitas laporan keuangan BMT pada umumnya adalah mampu menginformasikan dan memudahkan pengguna dan pembaca untuk memahami dan dapat diasumsikan dalam pengetahuan yang memadai tentang suatu aktifitas didalamnya, informasi yang bermanfaat dan relevan untuk memenuhi suatu kebutuhan guna memproses untuk pengambilan suatu keputusan.

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, akan tetapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BMT sendiri menerapkan prinsip syariah seperti lembaga keuangan lainnya. Pada dasarnya kelembagaan BMT lemah dalam pengawasan, dengan lemahnya pengawasan

sehingga tidak adanya aturan yang memikat dari dinas koperasi. Mereka menjalankan kegiatan operasional maupun pelaporan keuangan berdasarkan peraturan regulasi masing-masing BMT. Dari sisi kelembagaan BMT yang lemah dalam pengawasan, tidak ada aturan yang mewajibkan terkait PSAK sebab BMT regulasinya lemah. Terkait dengan laporan keuangan maupun kegiatan operasionalnya, maka BMT belum mematuhi atau tidak mengacu dengan PSAK terkait dengan laporan keuangan dan kegiatan operasionalnya.

BMT Syariah Makmur (BMT SM) merupakan salah satu koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT Syariah Makmur telah berbadan hukum koperasi dengan No. 001/BH/X.9/I/2007 tertanggal 10 januari 2007 yang di keluarkan oleh Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung. Transaksi yang paling banyak digunakan dan dilakukan salah satunya adalah pembiayaan musyarakah, pembiayaan musyarakah adalah kerja sama penyertaan modal usaha dan kewajiban mengangsur pokok pembiayaan secara berkala dengan memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati antara BMT Syariah Mandiri dan anggota/peminjam berdasarkan akad musyarakah.

Tabel 1
Perkembangan Pembiayaan Selama Tahun Buku
Tahun 2016, 2017 dan 2018

Tahun	Jenis Pembiayaan							Jumlah
	Mudharabah	Bai' Bitsaman Ajil	Murabahah	Musyarakah	Qordh	Rahn	Ijarah/Bba	
2016	1.000,0	0	0	780.410,0	17.500,0		90.550,0	890.360,0
2017	0	0	32.060,0	750.300,0	0	3.500,0	106.500,0	892.360,0
2018	0	0	15.000,0	660.200,0	0	0	60.700,0	735.900,0

Sumber Data : Data pada laporan perkembangan pembiayaan selama tahun buku pada tahun 2016, 2017 dan 2018 BMT Syarih Makmur Bandar Lampung.

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa pembiayaan pada tahun 2016-2018 yang disalurkan meliputi pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Qordh, Rahn dan Ijarah, dan pelaporan keuangan yang tepat perlu dilakukan oleh BMT Syariah Makmur terkait semua transaksi-transaksi yang dilakukannya.

Hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Reza Rezita tentang Penerapan PSAK No. 101 pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan adalah BMT Sakinah hanya membut dua jenis laporan, sedangkan menurut PSAK No. 101 ada tujuh jenis laporan keuangan, dari tujuh jenis laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 101 hanya empat jenis laporan keuangan yang bias diterapkan pada BMT Sakinah, dikarenakan tidak adanya data. Penyajian posisi keuangan yang dibuat oleh BMT Sakinah dimana pihak BMT tidak melakukan pemisahan asset tetap (inventaris). Sedangkan dalam PSAK NO. 101 aset tetap dipisahkan. Seperti, computer, printer dan software. Sehingga ada beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak BMT dalam menyusun laporan posisi keuangan agar sesuai dengan PSAK No. 101. Penyajian laporan laba/rugi, dimana nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibuat oleh pihak BMT Sakinah, tidak sesuai dengan laba tahun berjalan pada laporan posisi keuangan (neraca) tahun 2014.⁹

Hasil penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Amrul dan Musfiari Haridhi tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh) adalah Baitul Qiradh di Kota Banca Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Hal ini diketahui dalam penjabaran dan skor capaian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dimana tidak ada Baitul Qiradh

⁹ Reza Rezita "Penerapan PSAK No. 101 pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan" Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar (2017) h.68.

yang mencapai skor 100% pada penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK.¹⁰

Dilatar belakangi dari riset terdahulu, penelitian selanjutnya mencoba untuk menguji kembali **“PENERAPAN PSAKN0. 101 PADA LAPORAN KEUANGAN BMT SYARIAH MAKMUR BANDAR LAMPUNG”**

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yaitu, Komponen-komponen PSAK No.101 (2016) Tentang Penyajian Laporan keuangan yang terdapat pada laporan keuangan BMT Syariah Makmur Bandar Lampung pada tahun 2018

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah didalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung?
2. Apakah penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penyajian laporan keuangan pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

¹⁰ Amrul Ihksan, Musfiari Haridhi. “ Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)”. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, JIMEKA, Vol. 2, No. 3, 2017), h. 109.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sesuai dengan berkaitannya judul yang diteliti yang dapat memberi efek sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di dalam bidang akuntansi syariah. Penelitian ini di harapkan dapat memunculkan ide dan gagasan baru dalam penelitian selanjutnya yang sehubungan dengan penyajian laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Bagi manajemen BMT Syariah Makmur, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi akuntansi syariah, sehingga di masa yang akan mendatang dapat meningkatkan dan memperbaiki penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian R. Sanjaya Silalahi (2012) dalam Penelitian tentang Analisis Penerapan PSAK NO. 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai–Pekanbaru. BMT AlIttihad Rumbai–Pekanbaru dalam mempertanggungjawabkan keuanganya hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba/ Rugi. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai–Pekanbaru tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi informasi mengenai zakat disajikan di Neraca. Berdasarkan

Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai–Pekanbaru tidak membuat laporan dana kebajikan tetapi memasukkan akun–akun pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ke dalam Laporan Neraca, misalnya infaq/shadaqoh dan pembiayaan qardhul hasan.¹¹

Penelitian Hana Rahmanida (2015) dalam Penelitian tentang Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri. Prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan keuangan dengan sistem LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan) berbasis XBRL (*Extensible Business Reporting Language*) dan Laporan keuangan manual dalam bentuk excel. Sedangkan untuk laporan tahunan, dilakukan proses auditing dan penyusunannya sesuai dengan format PSAK. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Secara umum, penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat BSM sudah baik. Hanya saja terdapat perbedaan istilah yang digunakan pada BSM yaitu Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/ Qardhul Hasan serta penggunaan dana tersebut. BSM menerapkan PSAK secara penuh dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada BSM telah sesuai dengan PSAK No. 101.¹²

¹¹ R.Sanjaya Silalahi “Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru” Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012), h. .66-67.

¹² Hana Rahmanida “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” Jurnal Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas

Penelitian Putri Ningtyas (2019) dalam Penelitian tentang Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali). Penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri masih belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi. Standar yang digunakan oleh BMT Wanita Mandiri pun belum secara jelas disebutkan, dari sisi syariahnya sendiri BMT Wanita Mandiri mengakui masih belum begitu mendalam menggunakan standarnya. Beberapa laporan keuangan wajib belum disajikan di BMT Wanita Mandiri, laporan keuangan tersebut seperti laporan ekuitas, laporan arus kas serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Faktor internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait dengan laporan keuangan, belum dilaksanakan SOP, terbatasnya SDM, kurangnya pemahaman dan pengetahuan pengurus terkait standar BMT khususnya penyajian laporan keuangan dan kurangnya pengawasan dari pihak internal BMT. Faktor eksternal yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan BMT Wanita Mandiri yaitu kurangnya sosialisasi terkait PSAK khususnya penyajian laporan keuangan, kurangnya SDM dari Dinas Koperasi yang memiliki pengetahuan terkait PSAK maupun standar penyajian laporan keuangan dan belum terdapatnya wadah yang khusus membahas mengenai PSAK.¹³

Penelitian Brian Aderinanda Bahri (2014) dalam Penelitian tentang Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga), PT. Asuransi Takaful Keluarga bisa dikatakan telah menerapkan PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah, baik PSAK no. 101 edisi tahun 2007 dan PSAK 101 edisi revisi tahun 2011. Mengenai sejauh mana

Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Riau (2015), h. 74.

¹³ Putri Ningtyas "Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali)" Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019), h.73.

penerapan PSAK 101 (revisi 2011) oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga, berikut pemaparannya.¹⁴

Penelitian Meri Mona Sri Yanti (2018) dalam Penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan, Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi mudharabah di Bank Syariah Mandiri medan khususnya pada implementasi akuntansi transaksi mudharabah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).¹⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitian yang dipakai ialah BMT yang berbasis koperasi dan bukan berbasis bank syariah dan penelitian terdahulu menggunakan PSAK 101 dan 105 sedangkan penelitian ini hanya menggunakan PSAK 101 saja.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan, pada kantor BMT Syariah Makmur di Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian di kantor BMT Syariah Makmur Bandar Lampung ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang

¹⁴ Brian Aderinanda Bahri "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)," Jurusan Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2014), h.79.

¹⁵ Meri Mona Sri Yanti "Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan (2018), h.57.

bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang sedang diteliti.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, dibutuhkan :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari hasil wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan wawancara secara langsung di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, laporan keuangan dan profil BMT Syariah Makmur Bandar Lampung serta arsip, baik yang dipublikasian maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca buku yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian social untuk menelusuri data historis.¹⁷ Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan BMT Syariah Makmur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu alat yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu

¹⁶Kanal Informasi-Pengertian Data Primer Dan Sekunder

¹⁷ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 177.

hal dari seseorang, yang dilakukan secara tanya jawab secara lisan.¹⁸

Jenis wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur untuk dapat memahami dan mencari tentang informasi secara mendalam terkait penerapan PSAK 101 pada laporan keuangan BMT Syariah Makmur, peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon pada pihak BMT Syariah Makmur

4. Metode Analisis Data

Pada tahap ini dilakukan setelah data terkumpul semua, dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Terdapat tiga metode analisis data kualitatif yaitu :

- a. Reduksi data, merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
- b. Penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, grafik, bagan dan matriks.
- c. Kesimpulan atau verifikasi, adalah tahap akhir dalam proses analisis data. bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan, dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan dengan

¹⁸ Arief, Ermawati & Tarigan, Djago, Dkk(1991:1990)-Buku Pengajaran Keterampilan Berbicara

kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.

5. *Content analysis*

Content analysis data yang digunakan adalah kualitatif, sampel yang digunakan adalah pengelola BMT Syariah Makmur yang diantaranya ialah manajer dan beberapa staff, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan BMT Syariah Makmur, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai dilakukan maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan akan mengemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan dasar hukum dari Al-Hadist:

النَّبِيِّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَسْعُودُ ابْنُ عَنْ : فَأَوَّلُ
الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى يَهْدِي الصَّدْقَ إِنَّ : قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
اللَّهُ عِنْدَ يُكْتَبَ حَتَّى لِيَصْدُقَ الرَّجُلَ وَإِنَّ ، الْجَنَّةَ إِلَى يَهْدِي
إِلَى يَهْدِي الْفُجُورَ وَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى يَهْدِي الْكُذِبَ وَإِنَّ ، صَدِّقاً
. عَلَيْهِ مَتَّقْ كَذَاباً اللَّهُ عِنْدَ يُكْتَبَ حَتَّى لِيَكْذِبُ الرَّجُلَ وَإِنَّ ، النَّارِ

Pertama: Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم, sabdanya: “Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka

dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta.”
(Muttafaq ‘alaih).

Dasar hukum dari Ijma’

Keberadaan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) adalah salah satu bentuk Ijma’ . AAOIFI adalah organisasi independent internasional yang menaungi lebih dari 200 member dari 40 negara termasuk bank central, institusi keuangan islam dan partisipan lain dari bank islam internasional dan industry keuangan (wordwide).

I. Sistematiaka Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari : Penegasan Judul, Latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian penelitian Terdahulu yang Relevan, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS

Bab ini akan menguraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari : Landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian yang ditemukan dilapangan

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil tersebut. Yang terdiri dari : Analisis data penelitian dan hasil temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan temuan studi berupa : Simpulan dan Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-data yang berkaitan dan kemudian menyebarkan informasi keuangan kepada pihak yang tertarik. Akuntansi adalah “bahasa bisnis” (*language of business*) karena melalui akuntansi lah informasi bisnis dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.¹⁹

Menurut Littleton, pengertian akuntansi adalah aktivitas yang bertujuan untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Definisi ini adalah inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi.

2. Tujuan Akuntansi

Akuntansi mempunyai tujuan utama untuk memberikan informasi ekonomi, antara lain aktiva, hutang, modal, proyeksi laba serta perubahan aktiva dan hutang. Lebih jelasnya adalah bertujuan menghasilkan laporan keuangan.

Adapun informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas, antara lain :

- a. Relevan, relevansi informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk maksud keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya.
- b. Dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk dari

¹⁹ Carls, Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersi Tri Wahyuni, Amir Abadi Yusuf, Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia Edisi 4) : Salemba Empat h. 3

istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai.

- c. Daya uji, informasi yang dihasilkan harus bias diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Artinya bahwa informasi yang dihasilkan harus berlandaskan pada realitas obyektif dengan adanya bukti.
- d. Netral, informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung kepada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.
- e. Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini mungkin supaya digunakan secepat mungkin dalam pengambilan keputusan manajemen.
- f. Daya banding, format dari informasi harus konsisten dan berlaku umum, sehingga bias dibandingkan, baik dengan informasi dari periode yang lalu maupun dari perusahaan yang sejenis.
- g. Lengkap, informasi akuntansi harus lengkap dengan meliputi seluruh data akuntansi keuangan, sehingga penerima informasi bias memahami secara keseluruhan dan tidak mempunyai pemahaman yang salah atas informasi tersebut.²⁰

Berikut ini 3 jenis tujuan akuntansi yang harus diketahui,

Tujuan Akuntansi Secara Umum :

- 1) Memberikan informasi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva perusahaan. Menyediakan informasi tentang perubahan pada berbagai sumber ekonomi yang sudah dikurangi dengan pajak dan berbagai biaya (netto).

²⁰ Nanu Hasanuh, Akuntansi Dasar: Teori dan Praktik (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 2.

- 2) Menyediakan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan.
- 3) Menyediakan informasi tentang perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan berupa aset, utang, dan modal.
- 4) Menyediakan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan untuk membantu para pengguna laporan tersebut.

Tujuan Akuntansi Secara Khusus :

Tujuan akuntansi secara khusus adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

Tujuan Akuntansi Kualitatif :

- a) Menyajikan informasi yang relevan.
- b) Menyajikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validitasnya.
- c) Memberikan informasi yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Menyediakan laporan keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan terkait aktivitas perusahaan.
- e) Menyajikan informasi transaksi terbaru (real time) atau sesegera mungkin.
- f) Menyajikan informasi yang disampaikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) dan dapat diperbandingkan.

- g) Cara membuat laporan keuangan harus lengkap dan memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku.²¹

3. Fungsi Akuntansi :

Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba/rugi perusahaan. Dengan akuntansi, Anda dapat mengetahui jumlah modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu.

Proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak dan untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Dengan proses akuntansi, Anda juga dapat menjelaskan kepada pihak ketiga seperti Bank atau investor mengenai kondisi perusahaan dengan tepat ketika suatu waktu Anda memerlukan kredit usaha.

4. Jenis - Jenis Akuntansi :²²

a. Akuntansi Keuangan (General Accounting)

Akuntansi ini merupakan jenis akuntansi yang paling umum dikenal masyarakat luas. Pada dasarnya, akuntansi keuangan mencakup berbagai pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam suatu periode. Laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam akuntansi, terdapat sebuah standar yang diterima umum oleh para pelaku akuntansi, baik pembuat laporan maupun

²¹ Sugiri, Eni Munarsih, Akuntansi dan Aplikasinya pada MYOB Accounting (Yogyakarta: Graha Ilmu, 20113), h. 5-7.

²² Ais Zakiyudin, Akuntansi Tingkat Dasar: Dilengkapi dengan akuntansi bagi oerorganisasi pengelola zakat (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 7-9.

pembaca laporan. Standar tersebut dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK.

b. Akuntansi Perbankan

Dalam akuntansi perbankan, pencatatan yang dilakukan berada di ruang lingkup perbankan. Akun-akun yang digunakan pun merupakan akun khusus di dunia perbankan. Sama dengan akuntansi keuangan, akuntansi perbankan juga menyajikan laporan untuk pihak internal dan eksternal. Namun tentunya pihak-pihak tersebut adalah pihak yang berhubungan dengan perbankan.

Laporan dalam akuntansi perbankan selain mencakup laporan keuangan, juga terdapat laporan mengenai transaksi yang terjadi di bank. Laporan data transaksi ini sudah diperhitungkan oleh pihak bank, yang disebut laporan rekening administrasi. Persamaan umum dalam akuntansi bank adalah, harta bank sama dengan modal dan hutang.

c. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

Pengertian akuntansi biaya adalah akuntansi yang mengelola segala biaya perusahaan, yang berfungsi mengendalikan dan membuat perencanaan akan biaya pada operasional perusahaan. Perencanaan dan pengendalian biaya kemudian dibuat sebagai landasan menentukan harga.

Akuntansi biaya membahas penentuan harga pokok berdasarkan berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Berdasarkan biaya atau beban perusahaan yang sudah direncanakan dan dikendalikan, harga pokok pun dibuat. Kemudian ditambahkan dengan laba yang ingin diraih untuk menentukan harga jual.

d. Akuntansi Audit (Auditing)

Sesuai dengan namanya, akuntansi audit adalah akuntansi yang bertugas melakukan audit. Dengan kata lain, akuntansi ini mencakup pemeriksaan transaksi dan laporan keuangan. Proses akuntansi audit bukan hanya pemeriksaaan. Akuntansi audit juga perlu memberikan penilaian atau opini mengenai kelayakan laporan keuangan yang diperiksa.

Akuntansi auditing dilakukan oleh pihak independen, supaya hasil laporan tidak berberat pada pihak tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan dalam proses auditing bersifat kritis dan sistematis. Serta memeriksa dengan teliti berbagai laporan keuangan suatu perusahaan, yang diikuti pemeriksaan transaksi dan bukti transaksi.

e. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)

Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang mencakup kegiatan manajemen perusahaan. Dalam akuntansi manajemen, terdapat dua informasi yang dihasilkan. Informasi kuantatif berupa laporan keuangan, dan informasi kualitatif berupa laporan non-keuangan.

Laporan keuangan dalam akuntansi manajemen memang ditujukan untuk pihak manajemen, yang kemudian digunakan oleh mereka. Berbeda dengan laporan pada akuntansi keuangan, pada akuntansi manajemen laporan bersifat rahasia dan tidak diperuntukkan untuk umum atau publik. Perhitungan yang dilakukan juga berdasarkan kebutuhan manajemen, serta mengacu pada sistem informasi manajemen.

f. Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak adalah akuntansi yang meliputi perhitungan pajak. Akuntansi ini berguna untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak terutang yang ditanggung perusahaan.

Seperti akuntansi yang lain, akuntansi ini juga menghasilkan laporan keuangan. Namun laporan dikhususkan mencakup berbagai perhitungan perpajakan dari pendapatan kena pajak atau PKP. Laporan ini dibuat untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan dan kebijakan mengenai pajak.

5. Pengertian Akuntansi syariah

Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada 2 (dua) hal yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia.²³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah tak hanya digunakan sebagai alat dalam menerjemahkan fenomena ekonomi saja, namun juga digunakan menjadi metode untuk menjelaskan kegiatan ekonomi yang dapat berjalan di dalam masyarakat Islam. Akuntansi syariah ini memiliki orientasi yang cenderung ke arah bidang sosial, meliputi isu-isu yang tidak dibahas pada akuntansi konvensional.

Dalam ajaran islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat didalam

²³ Ir. Muhammad Syakir Sula AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (life and general), h. 386

al- Qur'an yaitu pada surah Al – Baqarah ayat 282.²⁴ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْشَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمَ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya :

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

²⁴ Alwy Musa Muzayyin, Tafsir Ekonomi Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu''. (QS. Al-Baqarah: 282)²⁵

Ayat diatas menunjukan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.

6. Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah serangkaian proses dari pelaporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

²⁵ *Ibid*, h. 49.

7. Tujuan laporan keuangan syariah :

- a. menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.²⁶
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- c. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi, asset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan penggunaannya
- d. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas pada tingkat keuntungan yang layak.
- e. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*), fungsi social entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.²⁷

8. Asas Transaksi Syariah

Transaksi syariah berdasarkan pada prinsip :²⁸

- a. Persaudaraan (*ukhuwah*) yang berarti bahwa transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan diatas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awum*), saling menjamin (*takaful*), saling bersinergi dan saling beraliansi (*tahaluf*).

²⁶ Gustani, SEI.,M.Ak.,SAS: Apa Tujuan Laporan Keuangan Syariah.

²⁷ Drs. Slamet Wiyono, Ak, MBA, SAS , Taufan Maulamin, SE, Ak, MM, *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013) h. 76-77.

²⁸ Rijal Yahya, et al. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.81-82.

- b. Keadilan (*'adalah*) yang berarti selalu menempatkan sesuatu hanya pada yang berhak dan sesuai dengan posisinya.
- c. Kemaslahatan (*maslahah*) yaitu segala kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif.
- d. Keseimbangan (*tawazun*) yaitu keseimbangan antara aspek material dan spiritual antara aspek privat dan publik antara sector keuangan dan sector riil, antara bisnis dan social serta aspek pemanfaatan serta pelestarian.
- e. Universalisme (*syumuliyah*) dimana esensinya dapat dilakukan oleh, dengan dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*).

9. Karakteristik Transaksi Syariah

- a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling rida
- b. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (*thayib*)
- c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas
- d. Tidak mengandung unsure riba
- e. Tidak mengandung unsure kezaliman
- f. Tidak mengandung unsur maysir
- g. Tidak mengandung unsure gharar
- h. Tidak mengandung unsur haram.²⁹

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101 Tahun 2016 Tentang Penyajian laporan Keuangan Syariah

- 1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah
 - a) Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi keuangan adalah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi

²⁹ Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 93-94.

Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. Standar Akuntansi Keuangan merupakan tata cara pencatatan, pengukuran, pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan laporan keuangan.

b) Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAS)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 Tahun 2016

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.³⁰

Entitas syariah menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Entitas syariah yang dimaksud

³⁰ IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 paragraf 1

dalam pernyataan ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. SAK mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa lain.³¹

Komponen laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari :

a. Laporan Posisi Keuangan

Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) piutang usaha dan piutang lain;
- 3) persediaan;
- 4) investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
- 5) aset keuangan;
- 6) total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual’;
- 7) properti investasi;
- 8) aset tetap;
- 9) aset tak berwujud;
- 10) utang usaha dan terutang lain;
- 11) liabilitas keuangan;
- 12) liabilitas dan aset dan pajak penghasilan;
- 13) liabilitas dan aset pajak tangguhan;
- 14) liabilitas yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual;
- 15) provisi;
- 16) kepentingan non pengendali
- 17) modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

³¹ IAI, IFAC, Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2017 (IAI,Cetakan Pertama November 2016, PSAK No. 101 paragraf 02-04.

b. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disusun dengan mengacu pada SAK yang relevan. Entitas pengelola menyajikan laporan komprehensif yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:

- 1) pendapatan usaha;
- 2) bagi hasil untuk pemilik dana;
- 3) bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas;
- 4) beban pajak;
- 5) jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan (aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan);

c. Laporan Perubahan Ekuitas

- 1) Laba rugi;
- 2) Penghasilan komprehensif lain; dan
- 3) Transaksi dengan pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi, distribusi dan perubahan kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian.

d. Laporan Arus Kas;

Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas syariah dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 : laporan arus kas mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.

- 1) Aktivitas operasi;
- 2) Aktivitas investasi;
- 3) Aktivitas pendanaan.

- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- 1) Dana zakat berasal dari wajib zakat;
 - 2) Dari dalam entitas syariah;
 - 3) Dari luar entitas syariah;
 - 4) Penyaluran dana zakat melalui entitas pengelola zakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5) Kenaikan atau penurunan dana zakat;
 - 6) Saldo awal dana zakat;
 - 7) Saldo akhir dana zakat.
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
- Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan :
- 1) Infak;
 - 2) Sedekah;
 - 3) Hasil pengelolaan wakaf;
 - 4) Pengendalian dana kebajikan produktif;
 - 5) Denda;
 - 6) Penerimaan nonhalal
- Penggunaan dana kebajikan untuk:
- 1) Dana kebajikan produktif;
 - 2) Sumbangan;
 - 3) Penggunaan lain untuk kepentingan umum;
 - 4) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
 - 5) Saldo awal dana kebajikan; dan
 - 6) Saldo akhir dana kebajikan.
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.³²

³² IAI, IFAC, Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2017 (IAI, Cetakan Pertama November 2016, PSAK No. 101 paragraf 09)

C. Ilustrasi Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK NO. 101:

1. Neraca

Tabel 2
PT Bank Syariah “X”
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 20X1

ASET	
Kas	xxx
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx
Giro pada bank lain	xxx
Penempatan pada bank lain	xxx
Investasi pada efek/surat berharga	xxx
Piutang:	
Murabahah	xxx
Salam	xxx
Istishna	xxx
Ijarah	xxx
Pembiayaan:	
Mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Persediaan	xxx
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx
Aset ijarah	xxx
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx
Penyertaan pada entitas lain	xxx
xxx	
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxx
Aset lainnya	xxx
Jumlah Aset	xxx
KEWAJIBAN	
Kewajiban segera	xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxx
Simpanan	xxx
Simpanan dari bank lain	xxx
Utang:	

Salam	xxx
Istishna'	xxx
Kewajiban kepada bank lain	xxx
Pembiayaan yang diterima	xxx
Utang pajak	xxx
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	xxx
Pinjaman yang diterima	xxx
Kewajiban lainnya	xxx
Pinjaman subordinasi	xxx
Jumlah Kewajiban	xxx
DANA SYIRKAH TEMPORER	
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Dana syirkah temporer dari bank:	
Tabungan mudharabah	xxx
Deposito mudharabah	xxx
Musyarakah	xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer	xxx
EKUITAS	
Modal disetor	xxx
Tambahan modal disetor	xxx
Saldo laba (rugi)	xxx
Jumlah Ekuitas	xxx
<i>Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas</i>	<i>xxx</i>

Sumber: PSAK 101, 2016

2. Laporan Laba/Rugi

Tabel 3
PT Bank Syariah “X”
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Dana	
oleh Bank sebagai Mudharib	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan marjin murabahah	xxx
Pendapatan neto salam paralel	xxx
Pendapatan neto istishna paralel	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan neto ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utama lainnya	xxx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana	
oleh Bank sebagai Mudharib	xxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik Bank	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xxx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xxx
Beban Usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
Jumlah Beban Usaha	(xxx)
Laba (Rugi) Usaha	xxx
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
Beban nonusaha	(xxx)

Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xxx
<i>Laba (Rugi) sebelum Pajak</i>	<i>xxx</i>
Beban Pajak	(xxx)
<i>Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan</i>	<i>xxx</i>

Sumber: PSAK 101, 2016

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4
BANK SYARIAH “X”
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 20xx

	20x1	20x2
Saldo per 1 Januari	Xx	Xx
Modal Awal Tahun	Xx	Xx
Ditambah (+)		
Simpanan Pokok	Xx	Xx
Simpanan Wajib	Xx	Xx
Modal Penyertaan	Xx	Xx
Modal Lainnya	Xx	Xx
SHU	<u>Xx</u>	<u>Xx</u>
Jumlah Tambahan	Xx	Xx
Dikurangi (-)		
Simpanan Pokok	Xx	Xx
Simpanan Wajib	Xx	Xx
Cadangan	Xx	Xx
Hibah	Xx	Xx
Modal Penyertaan	Xx	Xx
Modal Lainnya	Xx	Xx

SHU	Xx	Xx
Jumlah Pengurangan	Xx	Xx
Saldo per 31 Desember	Xx	Xx

Sumber: PSAK 101, 2016

4. Laporan Arus Kas

Tabel 5
KSPPS “ABC”
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 20xx
Arus kas dari Aktivitas Operasi:

<i>penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi cash bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi</i>			
penyusunan aktiva tetap		xx	
penyisihan penghapusan atas:		xx	
giro pada bank lain	xx		
penempatan pada bank lain	xx		
pembiayaan yang diberikan	xx		
Penyertaan	xx		
aktiva lain-lain	xx		
pajak yang ditangguhkan		xx	
zakat yang dibayarkan		xx	
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap		xx	
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>			
kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain		xx	
kenaikan/penurunan surat-surat berharga		xx	
kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan		xx	

kenaikan/ penurunan aktiva lain-lain			
kenaikan/penurunan simpanan			
<i>Wadiah</i>		XX	
<i>Mudharabah</i>		XX	
kenaikan/penurunan hutang pajak		XX	
kenaikan/penurunan kewajiban lainnya		XX	
kas bersih dari aktivasi operasi			XX
Arus kas dari aktivasi investasi:			
penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
pembelian aktiva tetap untuk disewakan		XX	
penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
investasi pada surat berharga		XX	
kenaikan/penurunan pada mudharabah/musarakah		XX	
penjualan persediaan		XX	
penjualan istishna'		XX	
kenaikan/penurunan bersih pada piutang		XX	
kas bersih dari aktivasi investasi			XX
arus kas dari aktiva pendanaan:			
penerimaan modal pinjaman		XX	
penerbitan saham		XX	
setoran modal		XX	
agio saham		XX	
pembayaran deviden		XX	
kas bersih dari aktivasi pendanaa			XX
kenaikan /penurunan kas dan setara kas			XX
kas dan setara kas awal tahun			XX
kas dan setara kas akhir tahun			XX

Sumber: PSAK 101, 2016

5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Tabel 6
BANK SYARIAH “ABC”
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
Per 31 Desember 20xx

Sumber dana Zakat		
Zakat dari dalam bank syariah	xx	
Zakat dari pihak luar Bank Syariah	xx	
Jumlah		xx
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat		
Kenaikan	(xx)	
Saldo Awal	(xx)	
Saldo Awal	(xx)	

Sumber: PSAK 101, 2016

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Tabel 7
BANK SYARIAH “ABC”
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN
Per 31 Desember 20xx

Sumber Dana Kebajikan Awal Periode	xx
Sumber Dana Kebajikan	
Dana Kebajikan dari KSPPS	xx
Dana Kebajikan dari Pihak Luar	xx
Jumlah Penerimaan	xx
Penggunaan Dana Kebajikan	

Disalurkan ke Lembaga Lain	
Badan Lainnya	xx
<i>Jumlah Penggunaan</i>	xx
Kenaikan (penurunan) Sumber atas Penggunaan	xx
Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	xx

Sumber: PSAK 101, 2016

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Neraca, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting ;
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

D. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil adalah lembaga mikro³³ syariah yang terdiri dari dua istilah yang mencerminkan kegiatan usahanya, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal mengarah kepada titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan baitul tamwil merupakan pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. BMT juga disebut dengan ‘koperasi syariah’, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya.

2. Badan Hukum BMT

Sampai saat ini keberadaan BMT belum mempunyai payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan badan hukum BMT saat ini memang menjadi permasalahan yang masih belum bisa diatasi, namun merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia 351.1/KMK/010/2009, Nomor 900-639a tahun 2009, Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor 11/43a/KEP.GBI/2009/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau koperasi atau badan usaha milik desa (BUMdes) atau lembaga keuangan

³³ Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa BMT memilih mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini bersifat pilihan bukan keharusan. BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ataupun dapat juga berbentuk badan hukum koperasi. Oleh karena itu BMT tunduk pada aturan perkoprasian, yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi. KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

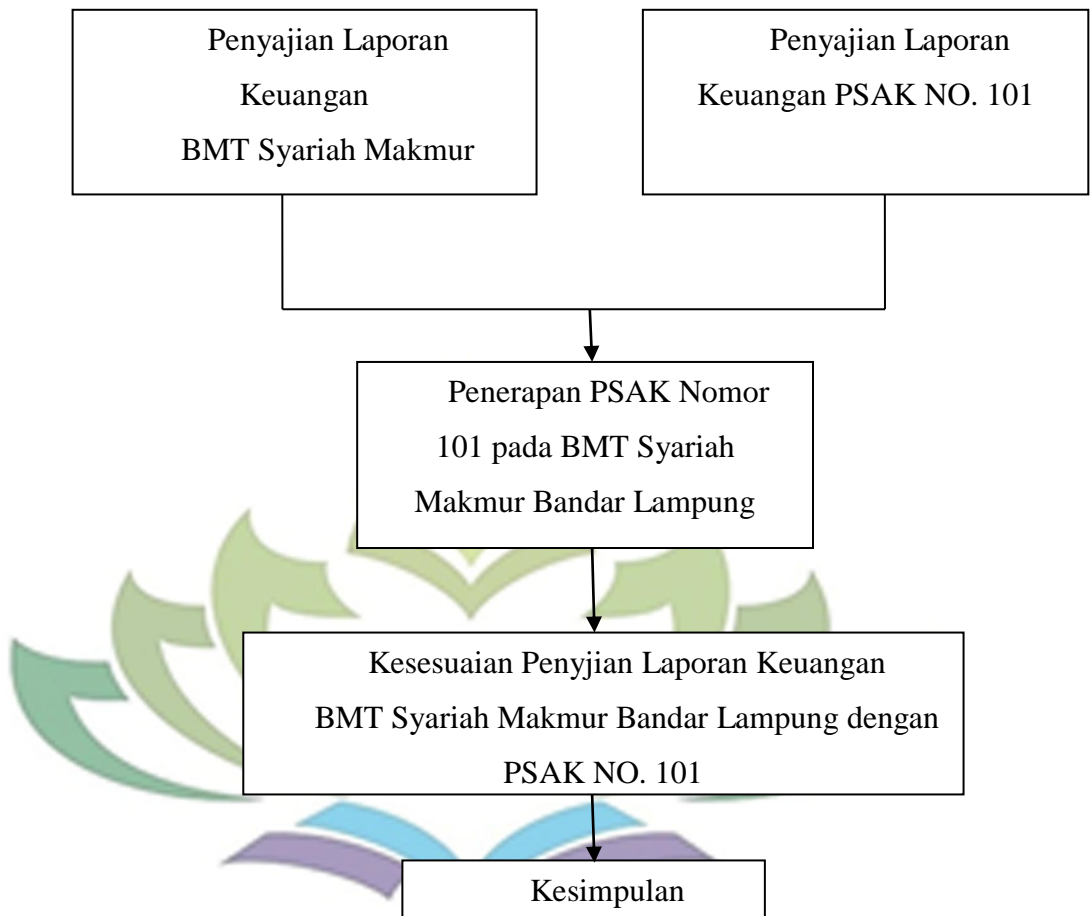
Namun, sejak adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan sendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas provinsi. Namun, dengan peraturan BMT sebagai LKM³⁴ sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 keluasan kecakupan BMT menjadi dibatasi.³⁵ Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.³⁶

³⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

³⁵ Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

³⁶ Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

E. Kerangka Berfikir



Gambar 1.

Kerangka Berfikir

Berdasarkan gambar diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaporan keuangan yang dibuat oleh BMT Syariah Makmur Bandar Lampung dan menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. BMT Syariah Makmur Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta, Kencana, 2012)
- Alwy Musa Muzayyin, Tafsir Ekonomi Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282
- Amrul Ihksan, Musfiari Haridhi. “ Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, JIMEKA*, Vol. 2, No. 3, 2017),
- Ais Zakiyudin, Akuntansi Tingkat Dasar: Dilengkapi dengan akuntansi bagi oerorganisasi pengelola zakat (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013),
- Arief, Ermawati & Tarigan, Djago, Dkk, Buku Pengajaran Keterampilan Berbicara, (1991:1990).
- Brian Aderinanda Bahri “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Studi Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga),” Jurusan Konsentrasi Asuransi Syariah Program Studi Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2014),
- Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),
- Carls, Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac, Ersu Tri Wahyuni, Amir Abadi Yusuf, Pengantar Akuntansi (Adaptasi Indonesia Edisi 4) : Salemba Empat
- Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009)

Hariyati, Susi Handayani dan Rohmawati Kesumaningtias : Buku 1, Praktikum Akuntansi Keuangan Menengah,

Hana Rahmanida “Penerapan PSAK No. 101 Pada Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri” Jurnal Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta Riau (2015),

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pak Fakhruroji Manajer BMT Syariah Makmur Via WhatsApp Pada Hari Jum’at, 9 agustus 2019 Pukul 07.43-13.58.

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK No. 101 paragraf 1

IAI, IFAC, Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2017 (IAI,Cetakan Pertama November 2016, PSAK No. 101 paragraf 02-04.

IAI, IFAC, Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2017 (IAI,Cetakan Pertama November 2016, PSAK No. 101 paragraf 09

IAI, 2009 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Cet. Ke-II. Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Kanal Informasi-Pengertian Data Primer Dan Sekunder

Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi BMT Syariah Makmur Tahun Buku 2018,

Meri Mona Sri Yanti “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.101 Dan No.105 Pada Bank Syariah Mandiri Medan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan (2018),Nanu Hasanuh, Akuntansi Dasar: Teori dan Praktik (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011),

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, ‘‘Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku’’.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002 Putri Ningtyas ‘‘Analisis Penyajian Laporan Keuangan Menurut PSAK 101 (Studi Pada BMT Wanita Mandiri Boyolali)’’ Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2019),

R.Sanjaya Silalahi ‘‘Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru’’ Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2012),

Reza Rezita ‘‘Penerapan PSAK No. 101 pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan’’ Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar (2017)

Rijal Yahya, et al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2012),

Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013)

Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2012),

Sugiri, Eni Munarsih, Akuntansi dan Aplikasinya pada MYOB Accounting (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013),

